

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran

Menurut Fadly, (2022) model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan pola atau prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar, termasuk tahapan, strategi, dan alur pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses Pendidikan. Dalam buku Model-model Pembelajaran karya Sitepu, (2025) menjelaskan bahwa model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman menyeluruh bagi guru dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran agar berlangsung secara terarah dan efektif. Pemahaman ini, Purnomo., dkk. (2022) dalam buku Pengantar Model Pembelajaran menunjukkan bahwa model pembelajaran tidak sekadar metode atau teknik mengajar, melainkan struktur konseptual yang menjadi pedoman dalam mengintegrasikan tujuan, materi, dan aktivitas belajar secara sistematis. Secara konseptual, model pembelajaran memiliki sejumlah komponen penting yang saling berkaitan. Helmiawati, (2012) menguraikan bahwa komponen model pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, sintaks atau tahapan kegiatan belajar, sistem sosial yang menggambarkan peran guru dan peserta didik, prinsip reaksi dalam merespons aktivitas belajar, serta sistem pendukung berupa sarana, prasarana, dan sumber belajar. Keberadaan komponen-komponen tersebut memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak bersifat acak, melainkan berlandaskan pada teori dan prinsip pembelajaran yang jelas. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pemilihan model pembelajaran yang tepat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Buku ajar Model-Model Pembelajaran untuk Implementasi, Sitepu, (2025) menegaskan bahwa model pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, serta konteks materi yang diajarkan. Berdasarkan orientasi dan karakteristiknya, model pembelajaran dapat diklasifikasikan dalam beberapa

jenis, seperti model pembelajaran langsung, model pembelajaran terpadu, model pembelajaran berbasis masalah, serta model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan nilai dan karakter.

2. Pendekatan Pembelajaran Bernilai

Pembelajaran bernilai (*value-based learning*) merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pengembangan nilai moral, etika, dan karakter peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dalam kajian tentang pendidikan nilai, Purnomo., dkk. (2022) menjelaskan bahwa pembelajaran nilai berfungsi membantu peserta didik memahami serta merefleksikan nilai-nilai moral dalam konteks kehidupan sosial yang plural. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak mempertimbangkan, memilih, dan menghayati nilai yang dipelajari. Sejalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka, pembelajaran bernilai memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Kemendikbudristek, (2022) menegaskan bahwa proses pembelajaran di sekolah perlu dirancang untuk mengembangkan dimensi-dimensi Profil Pelajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oleh karena itu, model pembelajaran yang diterapkan di kelas hendaknya mampu memfasilitasi peserta didik dalam memahami nilai secara konseptual sekaligus menginternalisasikannya melalui pengalaman belajar yang reflektif dan kontekstual

Integrasi nilai dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui penerapan model pembelajaran terpadu. Menurut Purnomo., dkk. (2022) model pembelajaran terpadu memungkinkan penggabungan berbagai konsep dan nilai ke dalam mata pelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Pendekatan ini relevan untuk pendidikan nilai karena mendorong keterkaitan antara pengetahuan, sikap, dan pengalaman nyata peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa model pembelajaran yang relevan untuk pembelajaran bernilai antara lain *Value*

Clarification Technique (VCT), pembelajaran berbasis masalah yang bermuatan nilai, serta pembelajaran berbasis proyek. Dalam kajian model pembelajaran inovatif, Nurdiyansyah & Tariyatul, E. (2016) menjelaskan bahwa model-model tersebut memiliki keunggulan dalam mendorong keterlibatan aktif peserta didik serta memfasilitasi proses refleksi nilai. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran bernilai perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta konteks lingkungan belajar agar proses internalisasi nilai dapat berlangsung secara optimal.

B. Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT)

1. Pengertian Model Pembelajaran VCT

Model pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT) merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Louis Rath, Merrill Harmin, dan Sidney Simon pada tahun 1950-an, menurut Nurdiyansyah & Tariyatul, E. (2016), model VCT sebagai pendekatan sistematis untuk membantu siswa mengklarifikasi, memilih, dan mengintegrasikan nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Dalam karya klasiknya, Hatmono dkk. (2025) menegaskan bahwa nilai tidak dapat ditanamkan melalui *indoktrinasi* atau instruksi langsung, melainkan harus dikembangkan melalui proses refleksi sadar, dialog terbuka, dan pengalaman pribadi yang bermakna. Oleh karena itu, model VCT menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan nilai. Landasan utama model VCT berpijak pada asumsi bahwa setiap individu memiliki nilai-nilai personal yang mungkin belum sepenuhnya disadari atau dipahami secara reflektif, melalui proses klarifikasi nilai, Suryani, (2018) menjelaskan bahwa siswa didorong untuk mengenali nilai yang mereka anut, mempertimbangkan alternatif yang tersedia, serta mengembangkan komitmen terhadap nilai yang dipilih secara sadar. Pendekatan ini, sebagaimana dijelaskan dalam kajian penerapan model VCT di sekolah dasar memungkinkan nilai berkembang secara autentik karena berangkat dari pengalaman dan pemikiran peserta didik sendiri.

Secara filosofis, model VCT berakar pada tradisi *humanisme* dan *konstruktivisme* yang menekankan otonomi individu dan pembelajaran yang

berpusat pada siswa. Perspektif *humanistik* dalam pendidikan nilai, sebagaimana dikemukakan Rohmah., dkk. (2022) memandang setiap individu dipandang memiliki potensi untuk tumbuh secara moral dan pengembangan nilai secara mandiri melalui proses refleksi dan pilihan bebas. Dalam pandangan ini, Suryani, (2018) menegaskan bahwa peran pendidikan bukanlah mendikte nilai, melainkan memfasilitasi perkembangan kesadaran dan tanggung jawab moral peserta didik. Sementara itu, pendekatan konstruktivistik menekankan bahwa pengetahuan dan nilai dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi sosial dan refleksi pengalaman, bukan diterima secara pasif dari otoritas *eksternal*, sehingga pembelajaran nilai harus memberi ruang dialog dan eksplorasi. Dalam konteks pendidikan nilai di masyarakat pluralistik, relevansi model VCT semakin kuat. Hatmono dkk. (2025) menekankan bahwa pendidikan nilai yang efektif perlu menghormati keberagaman perspektif moral tanpa kehilangan orientasi pada nilai-nilai dasar bersama. Model VCT, dengan pendekatannya yang *non-preskriptif* dan dialogis, memungkinkan peserta didik dari latar belakang yang beragam untuk menginternalisasi nilai secara reflektif dan kontekstual.

2. Sintaks dan Langkah-langkah Pembelajaran VCT

Sintaks model pembelajaran *Value Clarification Technique (VCT)* dikembangkan berdasarkan tujuh tahapan klarifikasi nilai yang dikemukakan oleh Rath., dkk. (1978). Ketujuh tahapan tersebut membentuk kerangka kerja sistematis dalam proses pembelajaran nilai dan selanjutnya dikelompokkan ke dalam tiga proses utama, yaitu memilih (*choosing*), menghargai (*prizing*), dan bertindak (*acting*).

- a. Memilih (*choosing*), terdapat tiga kriteria, yaitu memilih secara bebas (*choosing freely*), memilih dari berbagai alternatif (*choosing from alternatives*), dan memilih setelah mempertimbangkan konsekuensi (*choosing after consideration of consequences*). Pada tahap ini, pembelajaran dapat dilakukan melalui penyajian stimulus nilai berupa materi keberagaman budaya serta pemberian tugas analisis kepada peserta didik. Peserta didik diarahkan untuk memilih salah satu bentuk

keberagaman budaya, seperti bahasa daerah, makanan khas, senjata tradisional, rumah adat, tarian daerah, lagu daerah, atau pakaian adat, kemudian menganalisis peran, manfaat, dan dampak keberagaman budaya terhadap persatuan bangsa. Selain itu, peserta didik juga dapat diarahkan untuk memilih satu daerah tertentu dan mengidentifikasi identitas budaya daerah tersebut berdasarkan sumber informasi yang tersedia.

- b. Menghargai (*prizing*), terdapat dua kriteria, yaitu menghargai dan merasa bangga (*prizing and cherishing*) serta menegaskan di depan umum (*publicly affirming*). Tahap ini dapat diimplementasikan melalui penyajian kasus sosial yang berkaitan dengan keberagaman budaya serta diskusi reflektif mengenai pentingnya menghargai budaya orang lain. Selain itu, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai nilai melalui kegiatan presentasi hasil analisis budaya dan memberikan apresiasi terhadap presentasi teman.
- c. Bertindak (*acting*) terdapat dua kriteria, yaitu bertindak sesuai nilai (*acting upon choices*) serta bertindak secara konsisten dan berulang (*acting with consistency and repetition*). Pada tahap ini, Pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk merumuskan tindakan nyata dalam melestarikan budaya, seperti menghargai perbedaan budaya, tidak mengejek budaya orang lain, serta berpartisipasi dalam upaya pelestarian budaya sebagai bagian dari penguatan persatuan bangsa.

3. Karakteristik dan Keunggulan VCT dalam Pembelajaran

Model VCT memiliki karakteristik utama menurut Nurdiyansyah, & Fahyuni, (2016) menjelaskan bahwa berupa *non-direktif* dan *non-preskriptif*, artinya guru tidak menentukan nilai-nilai tertentu yang harus dianut siswa atau menghakimi pilihan nilai siswa, melainkan berperan sebagai fasilitator dalam proses klarifikasi nilai. Penekanan utama model VCT terletak pada proses refleksi, dialog, dan pengambilan keputusan nilai secara sadar, bukan pada penguasaan konten nilai tertentu. Selain itu, model VCT bersifat *student-centered* dan dialogis. Siswa didorong untuk aktif berdiskusi, mengemukakan pandangan, serta mendengarkan perspektif orang lain. Pendekatan dialogis ini,

sebagaimana dikemukakan sangat relevan untuk pendidikan nilai dalam masyarakat pluralistik karena mendorong sikap saling menghargai dan toleransi.

Keunggulan model VCT dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila sangat signifikan.

- a. Memfasilitasi internalisasi nilai yang mendalam, karena siswa secara aktif terlibat dalam proses memilih, mengevaluasi, dan merefleksikan nilai, Suryani, (2018) menekankan bahwa mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan komitmen yang lebih kuat terhadap nilai-nilai Pancasila dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengajarkan nilai secara didaktik. Penelitian menunjukkan bahwa nilai yang dipilih dan diklarifikasi secara mandiri oleh siswa memiliki dampak yang lebih besar terhadap perilaku moral dibandingkan nilai yang sekadar dihafal atau diterima tanpa refleksi.
- b. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam konteks moral, siswa dilatih untuk berpikir secara kritis tentang nilai-nilai, mengidentifikasi asumsi yang mendasari berbagai posisi moral, mengevaluasi argumen tentang nilai, dan membuat keputusan moral yang didasarkan pada pertimbangan rasional. Facione, (2020) menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan abad ke-21 yang menekankan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
- c. Menghormati keberagaman dan relevan, untuk konteks Indonesia yang *pluralistic* Hatmono dkk. (2025) menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang beragam secara budaya, agama, dan sosial, pendekatan *indoktrinatif* terhadap pendidikan nilai dapat bermasalah karena mengabaikan keberagaman perspektif nilai yang sah. Model VCT, dengan pendekatannya yang *non-preskriptif*, memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam cara yang relevan dengan konteks dan pengalaman mereka sendiri, sambil tetap mengembangkan komitmen terhadap nilai-nilai dasar bersama.

- d. Meningkatkan motivasi intrinsik siswa dalam pembelajaran nilai, karena siswa memiliki otonomi dalam memilih dan mengklarifikasi nilai mereka sendiri, mereka lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Motivasi intrinsik ini penting untuk pembelajaran yang berkelanjutan dan transfer pembelajaran ke konteks di luar kelas.

4. Teknik dan Strategi Implementasi Model VCT

Suryani, (2018) memaparkan bahwa Implementasi model VCT dapat dilakukan melalui berbagai teknik pembelajaran yang bersifat reflektif dan dialogis. Salah satu teknik utama adalah penggunaan pertanyaan klarifikasi nilai, yaitu pertanyaan terbuka yang mendorong peserta didik merefleksikan pilihan, perasaan, dan alasan moral mereka. Teknik ini banyak digunakan dalam praktik VCT di sekolah dasar karena mampu membimbing peserta didik melalui tahapan klarifikasi nilai secara sistematis. Selain itu, Rohmah., dkk. (2022) menyarankan penggunaan lembar klarifikasi nilai yang memuat dilema moral dan pertanyaan reflektif. Teknik ini efektif untuk memfasilitasi refleksi individual sebelum diskusi kelompok. Diskusi kelompok kecil dan bermain peran juga sering digunakan dalam pembelajaran VCT karena memungkinkan peserta didik mengeksplorasi nilai melalui interaksi sosial dan simulasi situasi nyata.

Melalui teknik-teknik tersebut, VCT dapat diimplementasikan secara fleksibel sesuai dengan konteks pembelajaran dan karakteristik peserta didik

- a. Pertanyaan klarifikasi nilai (*value clarifying questions*), teknik di mana guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk merefleksikan nilai, preferensi, dan keyakinan mereka.

Contoh pertanyaan meliputi:

- 1) “Apa yang paling kamu hargai dalam situasi ini?”
- 2) “Apa alternatif lain yang bisa kamu pilih?”
- 3) “Bagaimana perasaanmu tentang pilihan ini?”
- 4) “Apakah kamu akan melakukan hal yang sama jika situasinya berbeda?”

Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk membimbing siswa melalui tujuh tahapan klarifikasi nilai tanpa mengarahkan mereka ke jawaban tertentu (Suryani, 2018).

- b. Lembar klarifikasi nilai (*value sheets*), penggunaan lembar ini untuk menyajikan situasi moral atau dilema nilai dan meminta siswa untuk merespons melalui serangkaian pertanyaan yang memfasilitasi proses klarifikasi. Rohmah., dkk. (2022) menjelaskan bahwa lembar kerja ini biasanya mencakup deskripsi situasi, pertanyaan untuk mendorong analisis dan refleksi, serta ruang untuk siswa menuliskan pemikiran dan perasaan mereka. Teknik ini efektif untuk memfasilitasi refleksi individual sebelum diskusi kelompok.
- c. Diskusi kelompok kecil, strategi di mana siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan isu-isu nilai. Dalam diskusi ini, siswa berbagi perspektif mereka, hal ini sangat penting Rath., dkk. (1978) menjelaskan siswa dapat mendengarkan pandangan orang lain, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam nilai, dan mengklarifikasi posisi mereka sendiri melalui dialog. Guru berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa diskusi tetap fokus, semua siswa memiliki kesempatan untuk berbicara, dan suasana tetap mendukung dan tidak menghakimi.
- d. Bermain peran (*role playing*), sangat efektif untuk siswa mengeksplorasi nilai dalam konteks simulasi yang aman. menurut Suryani (2018) memaparkan bahwa siswa dapat memainkan berbagai peran dalam situasi moral, mengalami perspektif yang berbeda, dan merefleksikan bagaimana nilai mempengaruhi keputusan dan tindakan. Teknik ini sangat efektif untuk membantu siswa memahami kompleksitas moral dan mengembangkan empati.
- e. Analisis kasus, melibatkan presentasi kasus nyata atau fiktif yang mengandung dilema moral atau konflik nilai, diikuti dengan analisis mendalam tentang nilai-nilai yang terlibat, alternatif tindakan yang mungkin, dan konsekuensi dari setiap alternatif. Teknik ini mengintegrasikan analisis kritis dengan refleksi nilai.

C. Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL)

1. Pengertian Model Pembelajaran PBL

Model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered*) yang menggunakan masalah kompleks dan autentik sebagai konteks untuk siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan membangun pengetahuan konten. Model PBL pertama kali dikembangkan oleh Howard Barrows dan Robyn Tamblyn pada tahun 1980 di fakultas kedokteran McMaster University, Kanada, sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan pembelajaran tradisional yang terlalu menekankan pada transfer pengetahuan pasif. Model ini kemudian diadaptasi dan diterapkan secara luas di berbagai bidang pendidikan, termasuk pendidikan dasar oleh Arends, (2012) dalam buku *Learning to Teach* menjelaskan karakteristik utama model PBL yang pertama, model PBL menggunakan masalah sebagai titik awal pembelajaran, bukan sebagai aplikasi setelah pembelajaran konsep. Siswa dihadapkan pada masalah sebelum mereka mempelajari konsep-konsep yang relevan, yang memotivasi mereka untuk mencari pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kedua, masalah dalam model PBL bersifat kompleks dan autentik, mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Ketiga, Syamsidah & S, (2018) menekankan model PBL pada pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung. Keempat, PBL bersifat *student-centered* dengan guru berperan sebagai fasilitator bukan penyampai pengetahuan.

2. Sintaks dan Langkah-langkah Pembelajaran PBL

Sintaks model *Problem Based Learning* terdiri atas lima tahap utama. Menurut Richard I. Arends dalam buku *Learning to Teach*, penerapan model PBL meliputi lima langkah utama.

- a. Orientasi peserta didik pada masalah (*orient students to the problem*), yaitu tahap pengenalan masalah melalui penyajian stimulus pembelajaran yang dapat berupa materi konseptual, kasus sosial, maupun fenomena

kontekstual. Dalam konteks pembelajaran keberagaman budaya, stimulus dapat berupa materi tentang pengertian, cakupan, dan pelestarian keberagaman budaya, serta kasus sosial terkait sikap intoleransi terhadap perbedaan budaya.

- b. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar (*organize students for study*), yaitu kegiatan mengarahkan peserta didik pada aktivitas belajar kolaboratif melalui diskusi, pembentukan kelompok, serta pemberian lembar kerja berbasis analisis masalah;
- c. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok (*assist independent and group investigation*), yaitu proses peserta didik melakukan eksplorasi informasi, analisis permasalahan, serta pengkajian solusi terkait pelestarian budaya dan identitas budaya daerah.
- d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya (*develop and present artifacts and exhibits*), yaitu tahap peserta didik menyusun hasil analisis dan mempresentasikannya dalam bentuk laporan, media visual, atau produk pembelajaran.
- e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (*analyze and evaluate the problem-solving process*), yaitu kegiatan refleksi, penguatan konsep, serta evaluasi hasil dan proses pembelajaran.

C. Kemampuan Berpikir Kritis

1. Pengertian Berpikir Kritis

Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi esensial yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan di abad ke-21. Ennis, (2011) mendefinisikan berpikir kritis sebagai pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus pada penetapan apa yang harus dipercaya atau dilakukan, yang melibatkan disposisi dan kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi, menilai bukti, dan menghasilkan argumen logis. Facione (2020) memperkuat definisi ini dengan menyatakan bahwa berpikir kritis adalah penilaian yang bertujuan dan reflektif tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan dalam merespons observasi, pengalaman, ekspresi verbal atau tertulis, atau argument. Dalam konteks pendidikan dasar, kemampuan berpikir

kritis menjadi fondasi penting bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan bernalar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pendidikan dasar, Kurniawati & Ekayanti (2020) memaparkan bahwa berpikir kritis berfungsi sebagai fondasi bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bernalar, memecahkan masalah, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Facione (2020) menekankan bahwa kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan sejak dini melalui pengalaman belajar yang mendorong peserta didik untuk mengamati, mempertanyakan, serta merefleksikan informasi dan nilai yang mereka hadapi dalam lingkungan belajar. Sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional, pengembangan berpikir kritis menjadi bagian integral dari tujuan pembelajaran. Melalui Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek (2022) menegaskan bahwa pembelajaran harus dirancang untuk menumbuhkan kemampuan bernalar kritis sebagai salah satu dimensi utama Profil Pelajar Pancasila. Dengan demikian, berpikir kritis diposisikan tidak hanya sebagai keterampilan akademik, tetapi juga sebagai kompetensi karakter yang mendukung pembentukan warga negara yang reflektif dan bertanggung jawab.

2. Indikator Berpikir Kritis

Indikator kemampuan berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Facione (2020) yang mengembangkan kerangka yang lebih sederhana namun komprehensif yang dikenal dengan *Core Critical Thinking Skills*. Kerangka ini menekankan enam komponen inti yang saling berkaitan.

- a. Klarifikasi dasar (*Interpretation*): kemampuan memahami dan mengekspresikan makna atau signifikansi dari berbagai pengalaman, situasi, data, atau peristiwa.
- b. Menganalisis (*analysis*): kemampuan mengidentifikasi hubungan inferensial yang dimaksudkan dan aktual di antara pernyataan, pertanyaan, konsep, atau bentuk representasi lainnya.

- c. Menyimpulkan (*inference*): kemampuan mengidentifikasi dan mengamankan elemen-elemen yang diperlukan untuk menarik kesimpulan yang relevan.
- d. Penjelasan (*explanation*): melibatkan kemampuan menyatakan dan membenarkan penalaran seseorang dalam hal pertimbangan *evidensial*, konseptual, metodologis, dan kontekstual. di mana penalaran tersebut didasarkan. Siswa perlu mampu menjelaskan alasan di balik pilihan nilai dan tindakan mereka berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila.
- e. Evaluasi (*evaluation*): merujuk pada kemampuan menilai kredibilitas pernyataan dan representasi, serta menilai kekuatan logis dari hubungan inferensial aktual atau yang dimaksudkan.

3. Berpikir Kritis di Indonesia

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa menjadi salah satu tujuan utama kurikulum nasional. Kurikulum Merdeka secara eksplisit menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*) yang di dalamnya mencakup berpikir kritis sebagai salah satu dimensi Profil Pelajar Pancasila (Kemendikbudristek 2022). Hal ini sejalan dengan tuntutan kompetensi abad ke-21 yang dikenal dengan *framework* 4C (*Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration*) di mana berpikir kritis menempati posisi fundamental.

Penelitian Kurniawati & Ekayanti (2020) mengungkapkan bahwa siswa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, yang disebabkan oleh dominasi pembelajaran konvensional yang lebih menekankan pada hafalan dan pemahaman konsep daripada analisis dan evaluasi. Temuan ini diperkuat oleh hasil studi terbaru yang menunjukkan bahwa integrasi pembelajaran berbasis inkuiri dan klarifikasi nilai dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam model dan strategi pembelajaran yang dapat secara efektif mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa sejak dini.

D. Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar

1. Hakikat dan Tujuan Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila di SD/MI merupakan mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara Indonesia yang memiliki pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks SD/MI, Helmiawati, (2012) menjelaskan bahwa Pendidikan Pancasila menjadi fondasi penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini dan membentuk karakter siswa sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Secara hakikat Kemendikbud, (2022) menegaskan Pendidikan Pancasila dapat dipahami dari tiga dimensi yang saling terkait. Pertama, sebagai pendidikan nilai dan moral, Pendidikan Pancasila bertujuan untuk mengembangkan kesadaran moral siswa, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang luhur. Kedua, sebagai pendidikan kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi yang diperlukan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif terhadap kehidupan demokrasi. Ketiga, sebagai pendidikan karakter bangsa, Pendidikan Pancasila membentuk identitas nasional siswa, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan komitmen untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai bangsa

Tujuan Pendidikan Pancasila di sekolah dasar dapat dirumuskan dalam beberapa aspek, menurut Kemendikbud, (2022) di dalam buku guru Pendidikan Pancasila SD/MI Kelas V menjelaskan yang pertama, aspek kognitif siswa memahami makna dan hakikat setiap sila Pancasila, memahami hubungan antarsila, dan mampu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai konteks kehidupan. Kedua, aspek afektif, siswa menghargai dan menghayati nilai-nilai Pancasila, mengembangkan sikap positif terhadap kebhinekaan, dan memiliki komitmen moral untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Ketiga, aspek psikomotorik, siswa mampu mengamalkan

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun Masyarakat.

2. Nilai-nilai Pancasila dan Relevansinya bagi Siswa Sekolah Dasar

Nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar. Menurut Kemendikbud, (2022) setiap sila mengandung nilai fundamental yang relevan untuk dikembangkan sejak dini karena berkaitan langsung dengan pembentukan sikap, cara berpikir, dan perilaku peserta didik. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan sikap religius, toleransi, dan pembentukan akhlak mulia. Purnomo., dkk (2022) menyatakan bahwa penanaman nilai religius sejak usia sekolah dasar berperan penting sebagai fondasi moral yang mendukung internalisasi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial diwujudkan melalui sikap saling menghormati, menghargai keberagaman, musyawarah, serta kepedulian sosial dalam kehidupan sekolah. Pembelajaran nilai Pancasila akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan pengalaman konkret yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tantangan dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di SD/MI

Pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, buku karya Fadly, (2022) yang berjudul Model-model Pembelajaran untuk Implementasi memaparkan, sebagai berikut.

- a. Kesulitan menerjemahkan nilai abstrak, karena nilai-nilai Pancasila bersifat filosofis dan abstrak, sementara siswa sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif konkret operasional yang lebih mudah memahami konsep-konsep konkret. Guru perlu kreatif dalam menggunakan contoh-contoh konkret, cerita, dan pengalaman nyata untuk membantu siswa memahami nilai-nilai yang abstrak.
- b. Dominasi pendekatan konvensional, ketika pembelajaran Pendidikan Pancasila masih sering dilakukan dengan pendekatan yang bersifat *indoktrinatif* dan mengutamakan hafalan daripada pemahaman dan internalisasi nilai. Pendekatan ini kurang efektif untuk membentuk

karakter karena tidak melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan tidak memberikan kesempatan untuk refleksi mendalam tentang nilai.

- c. Keterbatasan kompetensi guru, masih banyak guru mengalami kesulitan dalam menggunakan model dan metode pembelajaran inovatif untuk pendidikan nilai. Mereka kurang memiliki pengetahuan tentang berbagai strategi pembelajaran nilai seperti VCT, dilema moral, atau pembelajaran berbasis proyek, serta kurang terampil dalam memfasilitasi diskusi nilai atau membimbing refleksi siswa.
 - d. Kesenjangan antara nilai yang diajarkan dengan praktik, merupakan salah satu tantangan terbesar adalah ketidakkonsistenan antara nilai-nilai Pancasila yang diajarkan di sekolah dengan praktik yang diamati siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Ketika siswa melihat guru, orang tua, atau tokoh masyarakat tidak mempraktikkan nilai-nilai yang mereka ajarkan, kredibilitas pendidikan nilai menjadi dipertanyakan dan internalisasi nilai menjadi sulit terjadi.
 - e. Pengaruh globalisasi dan modernisasi, siswa saat ini terpapar dengan berbagai nilai budaya asing melalui media massa, internet, dan jejaring sosial. Beberapa nilai ini mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti individualisme ekstrem, materialisme, atau hedonisme. Siswa perlu dibantu untuk dapat mengkritisi nilai-nilai yang mereka terima dari berbagai sumber dan membuat pilihan nilai yang bijaksana.
4. Keterkaitan Pendidikan Pancasila dengan Berpikir Kritis

Pendidikan Pancasila dan pengembangan kemampuan berpikir kritis memiliki keterkaitan yang sangat erat dan fundamental. Suryani, (2018) menjelaskan nilai-nilai Pancasila, meskipun merupakan nilai dasar negara yang harus dianut oleh seluruh warga negara Indonesia, tidak dapat dipaksakan atau ditanamkan melalui *indoktrinasi* semata. Sebaliknya, Facione, (2020) menegaskan bahwa nilai-nilai ini perlu dipahami, dianalisis, dan diinternalisasi melalui proses berpikir yang kritis dan

reflektif. Siswa perlu memiliki kemampuan untuk menginterpretasi makna nilai-nilai Pancasila dalam berbagai konteks. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang luas dan dapat dimaknai dengan berbagai cara. Kemampuan interpretasi membantu siswa memahami makna mendalam dari nilai-nilai tersebut dan relevansinya dengan kehidupan mereka. Selain itu, siswa juga perlu kemampuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam situasi konkret yang mereka hadapi. Kehidupan sehari-hari sering menyajikan situasi yang kompleks di mana tidak selalu jelas bagaimana nilai-nilai Pancasila harus diterapkan.

Lebih jauh lagi, siswa perlu kemampuan untuk mengevaluasi berbagai alternatif tindakan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan membuat keputusan moral yang rasional dan bertanggung jawab. Kurniawati & Ekayanti, (2020) melaporkan bahwa di dalam masyarakat Indonesia yang sangat *plural* dan *multikultural*, siswa sering dihadapkan pada situasi di mana terdapat ketegangan atau bahkan konflik antara nilai-nilai yang berbeda, baik antarnilai dalam Pancasila itu sendiri maupun antara nilai Pancasila dengan nilai-nilai budaya lokal atau global. Dalam situasi seperti ini, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting untuk membantu siswa menavigasi kompleksitas moral dan membuat keputusan yang bijaksana.

Integrasi antara pengembangan kemampuan berpikir kritis dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila sejalan dengan argumen teoretis dan empiris bahwa kedua aspek ini saling mendukung dan memperkuat. Kurniawati & Ekayanti, (2020) menjelaskan bahwa satu sisi, kemampuan berpikir kritis memfasilitasi pemahaman dan internalisasi nilai yang lebih mendalam. Siswa yang berpikir secara kritis tentang nilai-nilai Pancasila tidak hanya menerima nilai tersebut sebagai dogma, tetapi memahami mengapa nilai tersebut penting, bagaimana nilai tersebut dapat membimbing kehidupan mereka, dan bagaimana nilai tersebut relevan dengan tantangan yang mereka hadapi. Facione, (2020) menjelaskan bahwa di sisi lain, nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka moral yang

membimbing proses berpikir kritis. Berpikir kritis bukan proses yang nilai-netral, ia memerlukan standar dan kriteria untuk mengevaluasi argumen dan membuat keputusan. Nilai-nilai Pancasila menyediakan standar moral yang dapat digunakan siswa untuk mengevaluasi berbagai perspektif dan membuat keputusan yang etis.

5. Pendidikan Pancasila sebagai Konteks untuk VCT dan PBL

Pendidikan Pancasila memberikan konteks yang sangat relevan untuk penerapan model pembelajaran model VCT dan PBL. Namun demikian, karakteristik unik Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan nilai dan karakter memiliki implikasi penting terhadap pemilihan model pembelajaran yang paling sesuai. Sebagai pendidikan yang berfokus pada pembentukan nilai dan karakter, selaras dengan pendapat Nurdyansyah & Tariyatul, E. (2016) dimana Pendidikan Pancasila memerlukan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan moral siswa. Tujuan utama Pendidikan Pancasila bukan hanya agar siswa mengetahui atau memahami nilai-nilai Pancasila, tetapi agar nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam kepribadian siswa dan termanifestasi dalam sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, model VCT memiliki kesesuaian yang tinggi karena model pembelajaran ini secara eksplisit dirancang untuk memfasilitasi proses klarifikasi dan internalisasi nilai melalui refleksi mendalam, dialog, dan eksplorasi nilai-nilai pribadi. Rath., dkk, (1978), penggunaan model VCT membantu siswa untuk tidak hanya menerima nilai-nilai Pancasila sebagai sesuatu yang diberikan dari luar, tetapi untuk secara aktif mengeksplorasi makna nilai-nilai tersebut, mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai tersebut relevan dengan kehidupan mereka, dan mengembangkan komitmen personal terhadap nilai-nilai tersebut. Ketujuh tahapan model VCT diantaranya, memilih secara bebas, memilih dari alternatif, memilih setelah mempertimbangkan konsekuensi, menghargai dan merasa bangga, menegaskan di depan umum, bertindak sesuai nilai, dan

bertindak secara konsisten semuanya mendukung proses internalisasi nilai yang mendalam.

Sebaliknya, meskipun PBL juga dapat digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dengan menyajikan masalah-masalah kewarganegaraan yang memerlukan penerapan nilai-nilai Pancasila, Syamsidah & S. (2018) menjelaskan bahwa fokus utama model PBL pada pemecahan masalah praktis dan pencarian solusi mungkin kurang optimal untuk tujuan utama Pendidikan Pancasila yaitu internalisasi nilai. Subiyantoro, S. (2025), penggunaan model PBL lebih efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam konteks aplikasi pengetahuan dan pemecahan masalah, tetapi mungkin tidak memberikan ruang yang cukup untuk refleksi mendalam tentang nilai-nilai personal dan komitmen moral yang merupakan inti dari pendidikan nilai.

Penelitian ini membandingkan efektivitas berbagai model pembelajaran dalam Pendidikan Pancasila dan menemukan bahwa model-model pembelajaran yang berorientasi pada klarifikasi nilai dan pengembangan karakter, seperti model VCT, pembelajaran berbasis nilai (*value-based learning*), dan model pembelajaran *moral reasoning*, menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam meningkatkan internalisasi nilai dan pembentukan karakter dibandingkan dengan model pembelajaran yang lebih berorientasi pada aplikasi pengetahuan seperti PBL atau pembelajaran berbasis masalah.